

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN KARANG ASAM ILIR, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG, KOTA SAMARINDA

Putry Dilla Kiranti¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah selaku pemegang kekuasaan paling tinggi melaksanakan bermacam metode untuk menurunkan presentase kemiskinan, salah satunya dengan menghasilkan program yang mendukung masyarakat miskin yang dibuat oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan bahwa Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan dan kemiskinan dapat diperbaiki melalui program pemerintah yang membantu orang miskin. tujuan dari penelitian ini, Untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan Untuk mengetahui Kesejahteraan Masyarakat Miskin setelah hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH). Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

hasil penelitian ini dari setiap indikatornya dapat disimpulkan bahwa efektivitas program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ilir dapat dikatakan belum efektif, karena dari semua indikator hanya satu indikator yang tercapai. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam indikator ketepatan sasaran kurang efektif, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam indikator sosialisasi program sudah efektif, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam indikator tujuan program kurang efektif, Selanjutnya untuk indikator pemantauan program kurang efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat Miskin*

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email: putrydilla31@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara yang masih dalam proses pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi. Krisis moneter tahun 1997 semakin memperburuk kondisi, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan serta penurunan kualitas hidup masyarakat, ditandai dengan buruknya akses terhadap kesehatan, gizi, dan pendidikan.

Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memanfaatkan potensi diri secara fisik, mental, dan emosional. Garis kemiskinan digunakan sebagai ukuran minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan standar ini dapat berbeda antar negara.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program sosial dan bantuan langsung yang menysasar masyarakat berpenghasilan rendah. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Beberapa di antaranya termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Rastra, serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Di Kelurahan Karang Asam Ilir, jumlah penduduk mengalami peningkatan, namun tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Salah satu faktor pendukungnya adalah implementasi program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau yang termasuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini dirancang tidak hanya untuk membantu kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk memutus rantai kemiskinan secara jangka panjang antar generasi.

Tujuan utama PKH adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Caranya adalah dengan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk menyelesaikan pendidikan, serta memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Syarat utama bagi penerima PKH antara lain menyekolahkan anak, membawa bayi untuk vaksinasi, dan melakukan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil.

PKH juga mendukung lima sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu, Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Pengurangan kesenjangan antar wilayah,

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Perbaikan mutu lingkungan hidup, Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sebesar 10,86% atau sekitar 28,01 juta jiwa. Dalam RPJMN 2015–2019, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 7–8%. PKH menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut. Studi menunjukkan bahwa program ini meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat hingga 4,8%, hasil yang sejalan dengan negara-negara lain yang menerapkan model bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT).

Namun, pengelolaan program PKH tidak terlepas dari tantangan. Sejumlah kritik menyebutkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya transparan. Banyak kasus di mana dana tidak tepat sasaran, serta masyarakat miskin masih sering diposisikan sebagai objek, bukan subjek dari program. Efektivitas program pun menjadi bahan evaluasi. Menurut Sedarmayanti (2001), efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, lebih menekankan pada keluaran daripada proses atau input. Jika efektivitas dikaitkan dengan efisiensi, maka hasil yang dicapai akan semakin optimal meskipun efisiensinya belum tentu tinggi.

Melalui Program Keluarga Harapan, pemerintah tidak hanya ingin memberi bantuan keuangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri. Di Kelurahan Karang Asam Ilir, pelaksanaan PKH diharapkan dapat membantu keluarga miskin meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah Kota Samarinda, sejak tahun 2012, juga terus berupaya memperluas cakupan program ini.

Bantuan tunai dari PKH bisa dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas pengelolaan PKH di wilayah tersebut. Fokus penelitian mencakup apakah bantuan ini benar-benar dikelola dengan baik, sampai pada sasaran yang tepat, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi dan verifikasi data secara berkala dilakukan oleh tim pendamping PKH untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran. Jumlah penerima PKH setiap tahunnya bisa berubah tergantung hasil evaluasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas PKH menjadi penting, terutama dalam memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut para

ahli seperti Abdurahmat dan Sondang P. Siagian, efektivitas berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya secara sadar dan terencana untuk menghasilkan output yang sesuai target, tepat waktu, dan bermanfaat.

Efektivitas menekankan pada hasil atau dampak yang diperoleh, bukan hanya prosesnya. Dalam hal ini, efektivitas dapat diukur melalui pencapaian tujuan dibandingkan dengan target ideal. Semakin dekat hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Berbeda dengan efisiensi yang berfokus pada penghematan atau penggunaan input seminimal mungkin, efektivitas lebih menekankan pada pencapaian sasaran secara maksimal. Namun, penghematan yang berlebihan tanpa memperhatikan efektivitas bisa berdampak negatif terhadap hasil akhir.

Menurut Supriyono dan Mahmudi, efektivitas juga menggambarkan hubungan antara output dan tujuan organisasi. Jika output suatu program mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan, maka program tersebut dianggap efektif.

Secara keseluruhan, efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan, dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja organisasi, terutama di sektor publik.

Efektivitas Program

Menilai tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program, yakni dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983). Selain itu, umpan balik dari peserta program (klien) juga penting, seperti yang dijelaskan oleh Kirkpatrick (dalam Cascio, 1995), karena respons, kepuasan, dan persepsi mereka dapat menjadi indikator keberhasilan program (Tulus, 1996).

Menurut Subagyo (2000), ada empat variabel utama untuk mengukur efektivitas program:

1. Ketepatan sasaran – mengukur sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Sosialisasi program – menilai keberhasilan penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama kelompok sasaran.
3. Pencapaian tujuan – melihat sejauh mana hasil yang diperoleh mendekati tujuan program.
4. Pemantauan program – mencakup upaya evaluasi dan tindak lanjut terhadap dampak program bagi peserta.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya, penerima diwajibkan memenuhi syarat

di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penimbangan balita, serta memastikan anak-anak bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85%.

Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku RTSM ke arah yang lebih sejahtera.

Bantuan diberikan bulanan sebesar Rp200.000, dan dapat ditambah tergantung kondisi keluarga:

1. Rp800.000 untuk ibu hamil/menyusui atau anak di bawah 6 tahun,
2. Rp400.000 untuk anak usia SD/MI,
3. Rp800.000 untuk anak usia SMP/MTs.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Suharto (2014) dalam Ngutra (2017), kesejahteraan sosial mencakup tiga aspek utama:

1. Kondisi kehidupan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
2. Institusi kesejahteraan sosial, yakni lembaga dan profesi yang terlibat dalam pelayanan sosial.
3. Aktivitas sosial, berupa upaya sistematis untuk mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, iptek, dan keamanan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan dan program yang tepat. Mewujudkan kesejahteraan bukanlah hal mudah, tetapi dapat dicapai tanpa melanggar hukum atau nilai agama. Kuncinya adalah memahami indikator-indikator kesejahteraan, antara lain:

1. Pendapatan dan pemerataannya – Ketersediaan lapangan kerja yang layak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat.
2. Akses pendidikan – Pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik pendidikan formal maupun non-formal harus mendapat dukungan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama.
3. Pelayanan kesehatan – Kesehatan merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk hidup sejahtera. Pelayanan kesehatan harus tersedia secara merata, berkualitas, dan mudah diakses. Pemerintah wajib memastikan pelayanan ini terpenuhi.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan

pendidikan. Menurut Kuncoro (2002), kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan, sedangkan Suryawati (2005) menekankan dampaknya terhadap standar hidup secara keseluruhan. Ratih (2007) menambahkan bahwa kemiskinan juga berarti tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak. Basri (2005) menyebutkan bahwa kemiskinan terjadi ketika peluang untuk mengakses sumber daya pembangunan sangat terbatas.

Menurut Sthepan (2003), terdapat empat bentuk kemiskinan:

1. Kemiskinan Absolut: Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar karena pendapatan di bawah garis kemiskinan.
2. Kemiskinan Relatif: Terjadi akibat ketimpangan distribusi hasil pembangunan yang menciptakan kesenjangan kesejahteraan.
3. Kemiskinan Kultural: Disebabkan oleh nilai-nilai budaya dan gaya hidup yang tidak mendukung kemajuan, sehingga membatasi akses terhadap peluang ekonomi.
4. Kemiskinan Struktural: Akibat ketidakadilan dalam sistem sosial, politik, atau kebijakan yang menghambat masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ilir, Samarinda. Fokusnya pada empat aspek: ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data.

Hasil Penelitian

Ketepatan Sasaran PKH

Penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ilir belum sepenuhnya efektif. Meskipun data penerima didasarkan pada sistem DTKS dari Kementerian Sosial, masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, seperti warga miskin yang layak tidak menerima bantuan dan sebaliknya. Pihak Dinas Sosial dan pendamping PKH menilai program cukup tepat sasaran karena ada evaluasi rutin dan pemutakhiran data. Namun, pihak kelurahan menyampaikan bahwa data dari pusat sering tidak sinkron dengan kondisi riil, sehingga banyak nama yang tidak sesuai masih tercantum.

Penerima bantuan merasa program sudah tepat sasaran karena mereka merasa terbantu dan sesuai kriteria. Namun, warga non-penerima yang juga

memenuhi syarat merasa belum diakomodasi, menunjukkan adanya kelemahan dalam proses seleksi dan validasi. Empat komponen utama PKH pendidikan, kesehatan, lansia, dan disabilitas menjadi dasar pemberian bantuan, tetapi pelaksanaan di lapangan masih belum merata dan ada batasan-batasan tertentu, terutama untuk ibu hamil dan balita.

Secara keseluruhan, meskipun PKH membantu keluarga miskin, sistem penentuan penerima masih perlu ditingkatkan agar lebih adil dan tepat sasaran. Kolaborasi antara pusat dan daerah, serta evaluasi langsung di lapangan, sangat penting untuk memperbaiki efektivitas program.

Sosialisasi Program

Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui pertemuan kelompok bernama P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang dilaksanakan oleh pendamping PKH secara rutin, minimal satu bulan sekali atau dua bulan sekali. Sosialisasi ini mencakup informasi terkait pendidikan, pengasuhan anak, ekonomi keluarga, serta kebijakan terbaru PKH.

Wawancara dengan Koordinator Kota, pendamping, dan penerima manfaat menunjukkan bahwa sosialisasi telah berjalan secara konsisten. Meski begitu, pihak Kelurahan menyatakan tidak mengetahui adanya pertemuan rutin tersebut dan hanya menerima informasi dari Dinas Sosial melalui grup WA.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mayoritas KPM telah menerima informasi PKH secara rutin dan memahami isi sosialisasi karena disampaikan secara informal dan dekat dengan keseharian mereka. Sosialisasi dilakukan di berbagai tempat seperti rumah warga, mushola, atau rumah RT, tergantung situasi dan kesepakatan.

Tujuan Program

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat miskin, baik dalam jangka pendek (memenuhi kebutuhan dasar) maupun jangka panjang (memutus rantai kemiskinan antar generasi).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan PKH dianggap mampu membantu pendidikan anak dan ekonomi keluarga penerima. Namun, efektivitasnya dalam mensejahterakan masyarakat secara merata masih dipertanyakan karena ketidaktepatan sasaran dan belum semua warga miskin menerima bantuan.

Meskipun sebagian besar penerima merasa terbantu, ada yang menyatakan bahwa bantuan belum cukup untuk benar-benar mencapai kesejahteraan. Kesimpulannya, PKH telah berkontribusi pada peningkatan SDM, terutama dalam bidang pendidikan, tetapi belum sepenuhnya berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemantauan Program

Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ilir dilakukan secara berjenjang oleh koordinator kota, tim SDM, dan pendamping lapangan. Pemantauan dilakukan tanpa jadwal tetap, biasanya saat pertemuan kelompok atau kunjungan ke rumah KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Tujuannya untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak dan menghindari penyalahgunaan.

Namun, pemantauan ini belum sepenuhnya efektif mengatasi ketidaktepatan sasaran. Masih ada warga yang layak tapi belum menerima bantuan, serta penerima yang sudah mampu namun tetap menerima PKH. Evaluasi juga bergantung pada laporan dari masyarakat atau KPM itu sendiri.

Secara keseluruhan, pemantauan sudah berjalan cukup baik dari segi pelaksanaan teknis, tetapi belum optimal dalam memastikan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, efektivitas program PKH secara umum di wilayah ini masih belum sepenuhnya tercapai, dengan indikator sosialisasi menjadi satu-satunya yang dinilai berjalan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ilir masih menghadapi sejumlah tantangan pada beberapa indikator utama.

1. Dari aspek ketepatan sasaran, pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif. Masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memiliki data yang belum diperbarui, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam penentuan penerima manfaat. Akibatnya, sebagian masyarakat yang layak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara ada penerima yang seharusnya sudah tidak memenuhi kriteria lagi.
2. Pada aspek sosialisasi program, pelaksanaan telah berjalan dengan cukup baik. Sosialisasi dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH dalam pertemuan kelompok bulanan. Hal ini berdampak positif karena mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah memahami isi, tujuan, manfaat, dan kewajiban dalam program PKH.
3. Terkait tujuan program, implementasi PKH dinilai telah berjalan cukup maksimal. Program ini mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, masih terdapat kendala berupa pola pikir KPM yang perlu dibenahi agar mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan, serta adanya kecemburuan sosial di masyarakat akibat ketidaksesuaian penerima bantuan.
4. Pada indikator pemantauan program, pelaksanaannya belum optimal. Pemantauan yang dilakukan hanya sebatas dalam pertemuan kelompok,

sehingga belum mencakup seluruh dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap KPM. Terbatasnya jangkauan pemantauan ini menyebabkan beberapa permasalahan tidak teridentifikasi dengan baik, dan menghambat perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, meskipun Program PKH telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek validasi data, pemerataan penerima manfaat, dan mekanisme pemantauan yang lebih menyeluruh.

Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sejumlah rekomendasi disampaikan guna meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

1. Pada aspek ketepatan sasaran, perlu dilakukan pembaruan dan validasi data secara berkala pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pihak kelurahan dan pendamping PKH. Hal ini penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat teridentifikasi dengan akurat, sekaligus menghindari kesalahan data yang menyebabkan program tidak tepat sasaran.
2. Dalam hal sosialisasi program, meskipun telah berjalan cukup baik, kegiatan ini perlu dilakukan secara lebih rutin dan intensif. Tujuannya adalah agar para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat lebih memahami tujuan program dan terdorong untuk mengubah pola pikir, dari sekadar penerima bantuan menjadi individu yang proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
3. Terkait pencapaian tujuan program, disarankan adanya pendekatan yang lebih strategis dalam membentuk perilaku KPM agar bantuan tidak dianggap sebagai pendapatan tetap, melainkan sebagai stimulus. Selain itu, permasalahan teknis seperti keterlambatan pembaruan data juga harus segera ditangani agar program dapat berjalan selaras dengan tujuan awalnya.
4. Dalam aspek pemantauan program, diperlukan peningkatan intensitas kunjungan lapangan oleh pendamping PKH. Pemantauan yang lebih aktif dan berkelanjutan akan memberikan ruang bagi KPM untuk menyampaikan masalah secara langsung serta memungkinkan pendamping memberikan pendampingan dan solusi secara lebih responsif dan efektif.

Daftar Pustaka

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan

- Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial* INPUT. Volume 2 No.1
- Diahloka, C., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2014). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN*. 3(1), 29–37.
- Ilmu, J., Mamangan, S., & Nomor, V. I. I. I. (n.d.). *No Title*.
- Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.
- Luthfi, M. (2019). EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>
- Muin, R., & Rosdiana, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1844>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Nurul Najidah dan Hesti Lestari. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Program, E., Harapan, K., & Kecamatan, D. I. (n.d.). *Efektivitas program keluarga harapan di kecamatan pandak bantul*. 692–705.
- Purwoasri, K., Kediri, K., Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (1996). *PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP RUMAH TANGGA MISKIN (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan*. 2(1), 29–34.
- Roidah, I. S. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis*, 4(1), 39–47. <https://journal.unita.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/113>
- Saradan, K. (2007). *SARADAN KABUPATEN MADIUN Firma Kusuma Indrayani*
SI Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial , UNESA (

fir.ndutz@yahoo.com). 1–12.

- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10.
<https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31.
<https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
-
-